

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI DESA LANGGEE INDAH KABUPATEN KONAWA SELATAN

Haeriyah K

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sospol Universitas Sulawesi Tenggara

Email : haer.haeriyah@gmail.com

Abstract

The general objective of the Implementation of Government Administration is an effort to increase Development, with specific research objectives are (1) Description of the implementation of government administration and (2) know the factors of the implementation of government administration in improving development. The research method is qualitative descriptive, and the results of the study show that; (1) The administration of the administration of Langgea Indah Village has not yet fully played an effective role in supporting development. This can be seen in the aspects of development administration service mechanisms as well as in the administration aspects of the development process, (2) Problems encountered in the implementation of government administration functions in Langgea Indah Village is (a) the level of professionalism of the government apparatus in implementing the implementation of the concept of village government administrative functions both conceptually and technically, (2) Inadequate institutional aspects and management of village development and (3) Lack of participation from local communities to carry out implementation of village development in accordance with the plans that were made previously.

Keywords: *Government Administration; Development Improvement*

A. Latar Belakang

Administrasi Pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan.

Dalam proses pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Bab II Pasal (2), dijelaskan proses dan tata aturan penataan administrasi yang ada di desa yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi Kependudukan, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaksanaan Administrasi Desa adalah sebagai wujud pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan tepat sasaran, untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan terhadap aparat pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga aparatur desa dapat melakukan tugas dan kewajiban dalam melayani masyarakat. Agar Desa mampu menggerakkan, mengatur, mengendalikan, dan mendorong masyarakat untuk memajukan desa dengan pembangunannya, di butuhkan seorang kepala desa dan perangkat desa yang berhasil guna, professional. Selain itu juga perangkat desa juga harus bersih, produktif, berwibawa, kreatif, transparan, inovatif, peka, antisipati, serta juga mempunyai visi dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa (Sondang P. Siagian, 2008:159-163).

Administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan dan menerapkan administrasi Desa handal dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kemajuan dari suatu Desa ditentukan dengan kapasitas dan kapabilitas dari para pelaku dalam tata kelola administrasi yang diterapkan namun disamping sumber daya manusia yang baik harus juga dibaringi dengan efisien dan efektifnya penataan yang dilakukan sehingga dalam teknis penyelenggaraanya tidak akan mendapatkan masalah.

Penyempurnaan administrasi pemerintah hendaknya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, yaitu dengan cara pemerintah menempuh berbagai langkah-langkah persiapan pembenahan administrasi pemerintah yakni dengan menciptakan kondisi yang dinamis dalam pengembangan berbagai bidang. Fungsi administrasi pemerintahan pada umumnya dan pemerintahan desa pada khususnya telah banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat, karena semua aktifitas masyarakat tidak luput dari jangkauan administrasi pemerintahan.

Khusus dibidang administrasi pemerintahan desa dilakukan dengan pembentukan/ pengadaan berbagai pasilitas penunjang agar tercipta tertib administrasi.

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan. Maka tujuan penelitian adalah ; (1) Deskripsi Pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan dan (2) Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan.

B. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Administrasi

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala. Ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di Asia Selatan termasuk di Indonesia Cina dan Mesir Kuno dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintah. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik/ Negara (Thoha; 2008 ; 88). Administrasi dalam arti luas adalah segenap proses kegiatan untuk mencapai tujuan, sedangkan administrasi dalam arti yang sempit adalah segenap proses pelayanan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pelayanan ini dapat diartikan sebagai penyelenggaraan ataupun proses kegiatan.

Menurut prof. Drs. Haw. Widjaja (2005;3) administrasi mempunyai dua arti yaitu administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit. secara sempit administrasi diajukan sebagai kegiatan tulis menulis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi atau usaha. jadi administrasi tak lebih dari 17 pekerjaan tata usaha. seperti pekerjaan mengetik.dan lainnya(proses pelayanan) sedangkan dalam arti luas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan. Administrasi diartikan sebagai suatu proses penorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik.proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hiarki formal di tingkat atas yaitu fungsi pengarahan organisasi terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai.ditingkat menengah yaitu fungsi manajemen organisasi terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama,seperti memberikan bahan-bahan,sarana-sarana,intruksi-intruksi dan penciptaan iklim yang diperlukan staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (hasil). (Sahya Anggara;2012;11).

Lebih lanjut Herbert A. Simon dalam Thoha (1993 : 11) mengatakan bahwa administrasi dalam arti yang luas dapat di definisikan sebagai kegiatan dari

kelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan dalam arti sempit, administrasi meliputi pekerjaan tata usaha bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam suatu usaha (organisasi).

2.2. Administrasi Pemerintahan Desa

Amin Suprianti (2007: 19) menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Senada dengan pandangan di atas, administrasi pemerintahan desa yang bersumber dari wewenang pemerintah desa yang terdiri dari tugas dan kewajiban tanggung jawab dan hubungan-hubungan kerja yang dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku, guna menjalankan roda pemerintahan.

Berhubungan dengan administrasi pemerintahan desa, maka menurut Suwignyo (1989 : 32) bahwa administrasi pemerintahan desa memiliki 3 fungsi pokok yaitu : (1) fungsi pelayanan pada masyarakat, (2) fungsi operasional atau manajemen pembangunan, dan (3) fungsi ketatausahaan atau registrasi.

Pandangan Suwignyo di atas kiranya relevan baik bagi pemerintahan desa maupun pemerintahan kelurahan. Artinya bahwa pemerintahan desa, maupun pemerintahan kelurahan menjalankan aktifitas-aktifitas pelayanan masyarakat, manajemen pembangunan maupun ketatausahaan. Apabila fungsi-fungsi tersebut telah berperan dalam menunjang pembangunan masyarakat.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif, dengan Populasi penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: (a) Study kepustakaan (library research), yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan ini, (2) Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan menggunakan metode; Observasi (pengamatan) dan Interview (wawancara).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni semua data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Mekanisme Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan

Dalam penelitian ini administrasi pemerintahan desa mencakup fungsi pelayanan masyarakat, fungsi manajerial (operasional) pembangunan dan fungsi ketatausahaan. Untuk mengetahui lebih jelas dari pada fungsi administrasi dapat diuraikan dalam (3) aspek yaitu :

1. Fungsi Bidang Pelayanan Informasi dan Administrasi.

Tugas pelayanan yang dimaksud antara lain adalah yang bersifat informasi dan administratif, dimana kedua layanan ini penting untuk memudahkan, mendorong dan mempercepat perkembangan masyarakat desa. Hal tersebut dapat dimengerti bahwa dengan adanya pemberian pelayanan informasi yang baik dan terus menerus, dapat membantu masyarakat untuk memperoleh pengetahuan juga pengalaman dan pola pikir yang maju dalam merencanakan, mengembangkan dan memajukan kehidupan mereka. Sedangkan pelayanan administratif yang baik, dapat membantu masyarakat memperoleh kemudahan dan aktifitasnya.

Pelayanan informasi dilakukan baik secara formal maupun informal, diwujudkan dalam bentuk pemberian bimbingan oleh aparat desa dan petunjuk pada setiap kesempatan sebagai bahan masukan yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Pelayanan informasi secara formal, dapat diwujudkan dengan cara pemberian penyuluhan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, dilaksanakan secara terencana dan terprogram.

Tingkat Efektifitas pemberian layanan informasi ini dibingkai dalam bentuk jawaban responden terhadap layanan informasi sebagai berikut :

Tabel 1 : Kualitas Layanan Informasi dari Pemerintah Desa

No.	Tanggapan Responden	Frekwensi	(%)
1	Berkualitas	10	33,30
2	Kurang berkualitas	20	66,70
3	Tidak berkualitas	0	0,00
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil survei 2019

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 66,70% menyatakan kadang-kadang mendapatkan layanan informasi dari aparat pemerintah di sebabkan karena pada saat masyarakat membutuhkan informasi, selebihnya aparat pemerintah desa tidak dapat memberikan jawaban yang pasti sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelusuran memberikan jawaban bahwa masyarakat yang menyatakan bahwa layanan berbagai macam informasi yang dibutuhkan

masyarakat kurang mendapat perhatian oleh pihak aparat pemerintah desa. Akibat dari kurang/lambannya informasi yang diberikan tersebut afektifitas masyarakat menjadi kurang lancar, serta kurang berkualitasnya segala kegiatan yang dapat menunjang kelangsungan hidup masyarakat.

Dengan demikian disimpulkan bahwa intensitas laporan informasi sebagai wujud dari pendekatan motivasi psikologi dari unsur pemerintah terhadap masyarakat dalam pembangunan sikap, perilaku dan pola pikir yang maju relatif masih rendah. Kondisi ini dapat ditafsirkan sebagai rendahnya perhatian pemerintah desa terhadap pentingnya layanan informasi.

Untuk pelayanan di bidang adminsitatif, pengurusan perizinan, KTP ataupun urusan-urusan registrasi lainnya dari pemerintah desa kepada masyarakatnya, maka pada responden diberikan pertanyaan : “Bagaimana penilaian kualitas pelayanan admisnitratif dari aparat desa.” Untuk mengetahui pendapat responden terhadap pelayanan aparat pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2 ; Penilaian Terhadap Pelayanan Admisitrasi

No.	Tanggapan Responden	Frekwensi	(%)
1	Berkualitas	8	26,70
2	Kurang berkualitas	10	33,30
3	Tidak berkualitas	12	40
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil survei 2019

Data pada tabel diatas menunjukkan 40%, jauh lebih banyak, hal ini disebabkan karena pada waktu pengurusan dalam bidang administrasi oleh aparat desa relatif lamban bahkan seringkali aparat desa tidak berada ditempat, sehingga masyarakat harus menunggu waktu yang cukup lama. Sebagai contoh dalam pembuatan KTP oleh masyarakat yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 2 hari bisa menjadi 3-4 hari, hal ini merupakan bukti lambannya pelayanan aparat pemerintah desa dalam melakukan pelayanan adminsitasi sehingga dinilai oleh responden tidak berkualitas. Hal itu disebabkan beberapa faktor misalnya sikap tidak peduli dan masa bodoh aparat desa dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.

Dari keseluruhan data tersebut, memberikan gambaran bahwa mekanisme administrasi pemerintahan desa di Desa Langgea Indah dilihat dari aspek pelayanan bidang administasi belum dapat terlaksana secara efektif. Hal itu disebabkan masih kurangnya perhatian aparat desa terhadap kepentingan masyarakatnya.

2. Fungsi di Bidang Manajemen

Kemampuan aparat dalam menyelenggarakan fungsi administrasi pemerintah desa dan pembangunan desa, akan tercermin dari efektifitas proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas program-program pembangunan di desa. Dalam penelitian ini organisasi tiak dijelaskan secara konkret dikarenakan pemerintah desa merupakan suatu organisasi yang telah dibahas dalam 3 (tiga) aspek ini. Untuk lebih jelasnya maka dapat ditelaah lebih jauh sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan pemerintah desa merupakan persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pemerintah desa merupakan perencanaan jangka pendek, oleh karrena itu program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Langgea Indah terbatas pada subsidi desa. Dalam program-program subsidi desa biasanya direncanakan pemerintah desa, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh masyarakat desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Perumusan dan penetapan perencanaan pembangunan desa secara khusus mengenai subsidi desa dilaksanakan melalui forum LPM.

Keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan penetapan perencanaan desa merupakan hal penting untuk diketahui, maka untuk mengetahui tingkat keikutsertaan masyarakat atau responden dalam menentukan pembangunan, dilihat sebagai berikut :

Tabel 3: Penilaian Terhadap Keikutsertaan Masyarakat

No.	Kehadiran Responden	Frekuensi	(%)
1	Selalu hadir	11	36,70
2	Kadang-kadang hadir	13	43,30
3	Tidak pernah hadir	6	20,00
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil survei 2018

Gambaran tabel memperlihatkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap penentun program pembangunan melalui wadah LPM, masih terbilang rendah. Menurut informasi dari pengurus LPM bahwa rendahnya tingkat kehadiran menunjukkan masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arti penentuan program-program

pembangunan. Hal lain penyebab rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam setiap rapat menurut pengamatan penulis adalah faktor kesibukan dari pada warga masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup mereka, Hal ini dibuktikan dengan hanya 36,70 % yang selalu hadir dalam setiap rapat perencanaan program pembangunan, mereka yang hadir itu pada umumnya merupakan pengurus dan juga sebagai anggota LPM serta warga masyarakat yang mempunyai kepentingan langsung atas perumusan-perumusan program tertentu, misalnya izin usaha, rencana penerbitan pemilikan hak atas tanah, izin bangun dan lain sebagainya.

b. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan administrasi pemerintahan desa merupakan fungsi yang sangat penting agar dapat menentukan berhasil tidaknya pembangunan yakni fungsi pelaksanaan. Pelaksanaan pembangunan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai rencana yang telah disusun dan disusun dalam bentuk APPKD yang telah dikemukakan perlu direalisasikan agar dapat mencapai sasaran.

Agar melaksanakan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, maka pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Langgea Indah adalah pemerintah desa, BPD dan LPM, dalam hal ini LPM hanya sebatas pada pelaksanaan anggaran pembangunan desa. Untuk melihat sejauh mana fungsi pelaksanaan telah dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan pendapatan di Desa Langgea Indah , maka penulis meneliti mengenai masalah pengerahan tenaga kerja dalam setiap kegiatan pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana serta kerja bakti di desa.

Agar dapat mengetahui besarnya sumbangan dari masyarakat maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Tanggapan terhadap sumbangan masyarakat

No.	Jenis Sumbangan	Frekuensi	%
1	Dalam bentuk uang	8	26,70
2	Dalam bentuk barang	12	40,00
3	Dalam bentuk tenaga	10	33,30
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil survei 2019

Data tabel diatas, menunjukkan sebagian warga masyarakat 40% memberikan sumbangan dalam bentuk barang. Sumbangan dalam bentuk uang dan tenaga tidak begitu jauh berbeda yaitu 26,70% yakni mereka yang telah memiliki penghasilan tetap. Masyarakat yang memberikan

bantuan tenaga sebanyak 3,3%. Tanggapan ini dikuatkan dengan pandangan bahwa selagi tenaga mereka masih dapat membantu dalam pelaksanaan pembangunan di desa mereka, maka dengan hati tulus ikhlas memberikannya.

Berdasarkan dari dua data tersebut diperoleh gambaran bawa masyarakat di Desa Langgea Indah, berperan aktif dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama.

c. Pengawasan

Tujuan dari pada pengawasan ini sebagai langka konkret dari kegiatan yang perlu diambil agar kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana dan dilakukan perbaikan apabila didalam pelaksanaan terjadi penyimpangan dari tujuan sebelumnya serta dapat berhasil dengan baik. Adapun kegiatan pengawasan yaitu pemeriksaan, inspeksi, dan berbagai tindakan lain yang dapat mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tujuan dari pelaksanaan itu sendiri yakni ; (a) Agar pelaksanaan tugas umum pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan dapat berdaya guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya, (b) Agar hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan dapat menjadi umpan balik berupa pendapat dan kesimpulan dan sasaran dari berbagai kebijakan perencanaan pembangunan, (c) Untuk mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang dan uang milik negara, serta menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Dari hasil wawancara dan observasi didapatkan keterangan bahwa keuangan desa yang diperoleh dari subsidi desa mekanisme pengawasannya dilaksanakan oleh aparat pengawasan terbatas pada pelaporan, artinya pemerintah desa hanya memberikan informasi laporan kepada camat kemudian kepada bupati dan gubernur sampai kepada meteri dalam negeri mengenai realisasi pelaksanaan pembangunan. Selama ini belum ada pengecekan yang terjun langsung oleh aparat pengawasan fungsional (inspektorat wilayah daerah kabupaten).

Berdasarkan pula dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dipandang dari aspek pengawasan Desa Langgea Indah dinilai belum terlaksana secara efektif dan konsisten. Hal ini terlihat dari antara lain, tingginya frekwensi pelaksanaan konsultasi teknis menandakan banyaknya masalah yang dihadapi di lapangan.

4.2 Faktor-faktor Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dimaksudkan adalah sebagai faktor yang strategis yang memungkinkan berhasilnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan pembangunan desa tergantung pada intensitas daya dukung seperti ; (a) Tersedianya perangkat aturan karena adanya perangkat aturan yang memuat secara jelas dan sistematis mengenai metode dan prosedur memungkinkan penyelenggaraan administrasi dapat terlaksanakan dengan baik, (b) Faktor Kelembagaan ; Penyelenggaraan administrasi sebagai suatu proses kegiatan yang terencana dan terprogram berjalan efektif apabila didukung oleh tersedianya lembaga sebagai sarana strategis dalam melaksanakan kegiatan dan ditunjang oleh tersedianya berbagai sarana.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat proses pelaksanaan penyelenggaraan administrasi dalam upaya menciptakan iklim kerja. Hasil pengamatan penulis terhadap pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor yang menghambat yaitu ; (a) Masih rendahnya tingkat kesadaran aparat, karena kesadaran aparat sangat menentukan tercapainya tujuan penyelenggaraan administrasi dalam suatu organisasi kerja, baik sebagai atasan maupun sebagai bawahan untuk mentaati dan mematuhi aturan dalam arti melaksanakan apa yang diwajibkan dan menghindari apa yang dilarang. Hasil penelitian bahwa baik atasan maupun bawahan masih ada memiliki tingkat kesadaran rendah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, (b) Pelaksanaan koordinasi belum optimal, diketahui bahwa mekanisme administrasi lingkungan kantor Desa Langgea Indah belum terkoordinasi secara optimal fungsi administrasi, dibuktikan dengan belum terciptanya kesamaan pandang antara kepala desa dengan perangkat desa terhadap sistem, metode, prosedur pelayanan sehingga masing-masing masih berjalan sendiri-sendiri dan belum diterapkannya manajemen administrasi pemerintahan desa secara profesional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

E. Penutup

Pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa Langgea Indah belum sepenuhnya berperan secara efektif dalam menunjang pembangunan, Hal itu dapat dilihat pada aspek mekanisme pelayanan administrasi pembangunan maupun dari aspek ketatausahaan dalam proses pembangunan., (2) Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan di

Desa Langgea Indah adalah (a) tingkat kemampuan profesionalisme dari aparat pemerintah dalam mengimplementasikan cara penerapan dari fungsi administrasi pemerintahan desa baik secara konseptual maupun teknis, (2) Kurang baiknya aspek kelembagaan dan manajemen pembangunan desa dan (3) Kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat guna menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Disarankan kepada aparat pemerintahan desa untuk ; (1) Terus meningkatkan kemampuan dalam bidang ketatausahaan, agar dalam penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam kemampuan teknologi tepat guna misalnya pemanfaatan sistem komputerisasi di tingkat desa, (2) Perlunya ditingkatkan keterpaduan kerjasama dan kesatuan persepsi antara sesama aparat pelaksana pembangunan dalam memujudkan pembangunan sebagai suatu kesatuan yang saling terkait.

Daftar Pustaka

- Ahmad Farouk, M Yasin dkk, 2015, Anotasi Undang –Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, PATTIRO, Jakarta
- Bogdan, Rebert dan Steven J. Tailor. 1993 *Dasar-dasar penelitian Kualitatif, terjemahan oleh A. Khozim Afnadi*, Usaha Nasional Jakarta
- Bowman, P.J. Prof. DR. (1984) *Ilmu masyarakat dan Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Usaha Nasional, Surabaya Indonesia.
- Gibson, James L, John M. Ivancevich dan James H. Dommelly Jr. 2004. *Organizations: Behaviour, Structure and Process*, McGraw-Hill Companies Inc, Boston.
- Husein Umar. 2004. *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*. Cetakan ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartono. 2008. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siagian SP (1982), *Organisasi kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Bina Aksara, Jakarta.
- Siagian, SP, 2008 *Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta
- Saputra, Slamet, (1981), *Pengaruh Teknologi dalam Bahasa Indonesia*, LBI, Jakarta
- Wijaya, 1996, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. 5 Th 1979 (sebuah tinjauan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta